

# FENOMENA ‘BOSISME LOKAL’ DI ERA DESENTRALISASI: STUDI HEGEMONI POLITIK NUR ALAM DI SULAWESI TENGGARA

## *THE PHENOMENON OF ‘LOCAL BOSSISM’ IN THE DECENTRALIZATION ORDER: THE STUDY OF NUR ALAM POLITICAL HEGEMONY IN SOUTHEAST SULAWESI*

**Eka Suaib dan La Husen Zuada**

Dosen Universitas Halu Oleo, Kendari

*E-mail:* ekasuaib1966@gmail.com, husenzuadai@gmail.com

Diterima: 29 Juli 2015; direvisi: 19 September 2015; disetujui: 11 Desember 2015

### ***Abstract***

*This article discusses the emergence of Nur Alam as local bossism in Southeast Sulawesi. He started his career as an entrepreneur in the New Order era. Reform era and decentralization brought Nur Alam in political world by becoming the declarator of Amanat National Party (PAN) in Southeast Sulawesi, then lead the party and elected as a governor. After Nur Alam lead PAN in Southeast Sulawesi, this party has significant vote in the legislative elections in 2004, 2009 and 2014; was able to win the governor election in 2007 and 2012; and won 10 of 12 local election which took place in 2010 to 2013. During his leadership in Southeast Sulawesi, the economic growth was increased, the poverty rate was decreased, even the quality of physical infrastructure. His position as the leader of PAN as well as the governor in Southeast Sulawesi makes Nur Alam has big influence. He becomes stronger economically and more powerful politically because of his success in conquering his political opposition as well as his ability to collaborate with other local political elites. He also began to utilize the weakness of decentralization regulation by preparing his family as heir to the throne of his power.*

***Keywords:*** local bossism, decentralization, Southeast Sulawesi.

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang kemunculan Nur Alam sebagai bossisme lokal di Sulawesi Tenggara. Ia mengawali karir sebagai pengusaha di zaman Orde Baru. Reformasi dan desentralisasi membawa Nur Alam masuk dunia politik dengan menjadi deklarator Partai Amanat Nasional, lalu kemudian memimpin PAN Sultra dan terpilih sebagai Gubernur. Pasca dipimpin Nur Alam, PAN Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan suara dan kursi pada Pemilu Legislatif 2004, 2009 dan 2014; mampu memenangkan pemilihan Gubernur 2007 dan 2012; serta memenangkan 10 dari 12 Pemilukada Kabupaten/Kota yang berlangsung tahun 2010 sampai 2013. Saat dipimpin Nur Alam, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara meningkat, angka kemiskinan menurun dan kualitas infrastruktur fisik semakin baik. Posisi Nur Alam sebagai ketua PAN sekaligus sebagai Gubernur menjadikannya sangat berpengaruh di Sulawesi Tenggara. Nur Alam semakin kuat secara ekonomi dan semakin berkuasa secara politik, berkat keberhasilannya menaklukkan lawan politiknya serta kemampuan menjalin kerja sama dengan para elit politik lokal lainnya. Ia juga mulai memanfaatkan kelonggaran pengaturan desentralisasi dengan mempersiapkan keluarganya sebagai pewaris tahta kekuasaannya.

**Kata Kunci:** bossisme lokal, desentralisasi, Sulawesi Tenggara.

## Pendahuluan

Reformasi politik pasca jatuhnya rezim Soeharto tidak otomatis mendorong lahirnya demokratisasi. Pergeseran kekuasaan dari sentralisme ke desentralisasi justru memunculkan ‘banyak Soeharto’ kecil di Indonesia, khususnya dalam arena politik lokal.<sup>1</sup> Situasi politik era reformasi ini menyerupai situasi perbanditan seperti istilah yang disebut oleh Mancur Olson<sup>2</sup>, dimana penguasaan politik dan ekonomi beralih dari bandit besar (*strationaly bandits*) menuju bandit kecil (*roving bandits*). Fenomena seperti itu oleh John T. Sidel dinamai *local bossism* (bos lokal) atau dalam istilah Migdal dan Vedi Hadiz disebut sebagai *local strongmen* (orang kuat lokal) dan predator.<sup>3</sup>

Kemunculan ‘bos lokal’, ‘orang kuat lokal’ dan ‘predatoris’ di Indonesia menjadi fenomena yang mewabah di era reformasi.<sup>4</sup> Sosok bos lokal berkembang seiring dengan penyerahan kewenangan pemerintahan kepada daerah (desentralisasi), dimana fenomena ini jarang ditemukan di era sentralisasi karena pemerintahan dikelola secara terpusat.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Pada zaman Orde Baru, Soeharto dipandang sebagai sosok yang memiliki hegemoni, otoriter dan mampu melakukan kontrol sosial dalam menjalankan kekuasaan. Soeharto berhasil mempertahankan kekuasaan selama 32 tahun dengan memadukan tiga kekuatan besar yaitu ABRI/militer, Birokrasi dan Golkar (ABG). Baca Richard Robison, *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012).

<sup>2</sup> Lihat Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, “Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits”, *Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies*, Vol. 37 (Jebat: 2010), 86 – 104.

<sup>3</sup> Sidel Migdal dan Vedi Hadiz adalah ilmuwan yang melahirkan istilah yang berbeda ketika mengamati kemunculan orang kuat di tingkat lokal. Uraian perbandingan ketiganya, lihat Melvin P. Hutabarat, “Fenomena “Orang Kuat” Di Indonesia Era Desentralisasi: Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi”, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 28-30.

<sup>4</sup> Dalam artikel ini penyebutan/penggunaan istilah *Local Bossisme* (Bos Lokal), *Local Strongman* (Orang Kuat Lokal) dan Predator akan sering dipertukarkan satu sama lain. Penukaran ini bukan berarti menyamakan ketiganya, namun atas pertimbangan praktis (keringkasan) dalam penulisan.

<sup>5</sup> Peran atau pengaruh elit lokal di era sentralisasi tetap ada, namun demikian keberadaan elit lokal tidak melakukan monopoli, ia harus bekerja sama dengan elit pusat untuk menguasai sumber daya (*power resource*). Lihat Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, “Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik”, *Jurnal Ilmu Politik*, edisi 21,

Desentralisasi digunakan oleh sebagian elit politik lokal untuk membangun oligarki politik dan ekonomi, sehingga memunculkan orang-orang kuat di tingkat lokal.

Para bos lokal melakukan berbagai strategi untuk bisa bertahan hidup—memperluas dan mempertahankan kekuasaan—dengan membentuk aliansi segitiga akomodasi, bersama aparat birokrasi negara dan politisi di tingkat lokal.<sup>6</sup> Selain menggunakan partai politik, “orang kuat lokal” di beberapa daerah juga melakukan mobilisasi dengan mengeksploitasi politik etnis dan agama<sup>7</sup>, sebagaimana tampak pada Pilkadua Kabupaten Sumba Timur<sup>8</sup> dan kemenangan Ahmad Dahlan<sup>9</sup> dalam pemilihan Walikota Batam.

Sosok orang kuat lokal ditemukan pula pada keluarga Syahrul Yasin Limpo<sup>10</sup> di Sulawesi Selatan, Murman Efendi<sup>11</sup> di Seluma Bengkulu, Zulkifli Nurdin<sup>12</sup> di Jambi dan TB Chasan<sup>13</sup> di

---

2010, hlm. 5.

<sup>6</sup> Joel S. Migdal, *State in Society*, (Cambridge : Cambridge University Press, 2004), hlm. 88-93.

<sup>7</sup> Antonius Made Tony Supriatma, “Menguatnya Kartel Politik Para Bos”, *Jurnal Prisma*, Vol. 28, No. 2, Oktober 2009.

<sup>8</sup> Dua kandidat Bupati yaitu Uumbu Meheng Kunda dan Lukas Kaborang menggunakan simbol-simbol kultural dan keagamaan dalam memobilisasi dukungan rakyat untuk menjadi Bupati Sumba Timur tahun 2005. Lihat Jacqueline Vel, “Pilkada in East Sumba: An Old Rivalry in A New Democratic Setting”, *Indonesia*, No. 80, Oktober 2005, hlm. 94.

<sup>9</sup> Ahmad Dahlan, putra asli melayu, berhasil menjadi pemenang dalam pemilihan Walikota Batam. Keberhasilan Ahmad Dahlan ditentukan oleh kemampuannya menggunakan Laskar Hulubalang Putih, sebuah milisi etnis melayu dengan anggota sekitar 10.000 orang dalam memengaruhi rakyat Batam. Lihat Nankyung Choi, “Indonesia’s Direct Local Elections: Background and Institutional Framework”, *Rajaratnam School of International Studies Singapore Working Paper*, 2007.

<sup>10</sup> Michael Buehler dan Paige Tan, “Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics : a Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province”, *Indonesia*, No. 84, Oktober, 2007.

<sup>11</sup> Lihat Reko Adriadi, “Pemekaran Daerah dan “Bossisme Lokal”: Studi Kasus Praktik Kekuasaan Bupati Murman Effendi dalam Perkembangan Kabupaten Selama Periode 2005-2011,” Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013).

<sup>12</sup> Melvin P. Hutabarat, *op.cit*, hlm. 7-11.

<sup>13</sup> Lili Romli, “*Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten (2001-2006)*”, Disertasi Doktor, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).

Banten. Para orang kuat lokal ini menguasai perpolitikan di daerahnya melalui pemilu kompetitif era desentralisasi, yang dilangsungkan dengan cara tidak fair, penggunaan kekerasan, politik uang, politisasi birokrasi dan politik kekerabatan.

Di Sulawesi Tenggara, sosok ‘bos lokal’ tampak pada Nur Alam, Gubernur dua periode (2007-2012 dan 2012-2017). Sebelum menjadi politisi, Nur Alam adalah seorang pengusaha yang merintis usaha sejak zaman Orde Baru dan menjadikannya terpilih sebagai ketua Gapensi dan Kadinda Sultra. Pada zaman Orde Baru, Nur Alam menjadi sekretaris Kosgoro Sulawesi Tenggara, organisasi pendukung Golkar. Di era reformasi, Nur Alam menjadi anggota Komite Persiapan Pembentukan Wilayah (KPW) sebagai embrio berdirinya PAN di Sulawesi Tenggara. Kenggotaan Nur Alam di KPW menghantarkannya terpilih menjadi sekretaris DPW PAN Sultra, dan dua tahun berselang ia terpilih menjadi ketua DPW PAN Sultra.

Sejak dipimpin Nur Alam, pencapaian PAN sangat positif terutama dalam Pemilu legislatif dan Pemilukada. Selama tiga periode Pemilu Legislatif—2004, 2009, 2014—PAN berhasil menambah jumlah kursinya secara signifikan. Kesuksesan PAN dalam Pemilu legislatif terjadi pula di ajang Pemilukada, dimana pada tahun 2008 dan 2013 PAN memenangkan Pemilihan Gubernur. Selanjutnya, pada tahun 2010-2013, PAN Sultra berhasil memenangkan 10 dari 12 Kabupaten/Kota yang melangsungkan Pemilukada.

Pada tahun 2008, Nur Alam terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Posisi Gubernur dan Ketua DPW PAN Sultra yang dijabat oleh Nur Alam dimanfaatkan untuk memperluas jejaring politik. Di tingkatan elit ia memberikan dukungan politik kepada para elit yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati dan Walikota. Sementara di tingkatan massa, Nur Alam merawat *voters* dengan berperan layaknya ‘dewa penolong’ melalui bantuan dan program politik populis bernama Bahteramas.

Sulawesi Tenggara saat dipimpin Nur Alam semakin maju dengan pertumbuhan ekonomi di atas 10 % pada tahun 2012, penurunan angka pengangguran dan kondisi infrastruktur fisik yang

baik. Meskipun dipandang berhasil, Gubernur Nur Alam mendapat tantangan dari para aktivis dan pemerhati Sultra atas berbagai dugaan kasus skandal korupsi rekening gendut<sup>14</sup>, dugaan perzinahan<sup>15</sup>, pembangunan jembatan Bahteramas serta tindakan kekerasan dan kriminalisasi pada pihak yang kritis kepadanya. Namun demikian, Nur Alam tampak sangat lihai meredam pemberitaan media lokal, suara kritis aktivis dan LSM Sultra.

Menjelang Pemilukada Serentak 2015, Nur Alam berupaya memperluas pengaruh politiknya dengan memanfaatkan posisinya sebagai gubernur dan ketua DPW PAN Sultra. Sebagai Gubernur, ia memiliki kewenangan untuk mengusulkan nama Pj. Bupati yang akan melangsungkan Pemilukada. Selanjutnya, sebagai ketua DPW PAN, Nur Alam memiliki pengaruh untuk menentukan Calon Kepala Daerah yang didukung oleh PAN. Di Konawe Selatan ia mendukung kakak kandungnya sebagai calon Bupati Konawe Selatan Periode 2015-2020 dan mulai mempersiapkan istrinya, Asnawati Hasan (saat ini anggota DPR RI Dapil Sultra) untuk maju dalam pemilihan gubernur Sultra 2018.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, maka artikel ini mencoba membahas pengaruh politik yang dimiliki oleh Nur Alam dengan berusaha menjawab: Bagaimana proses Nur Alam menjadi “bos lokal” di Sulawesi Tenggara? Apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki Nur Alam? Bagaimana pengaruh Nur Alam terhadap politik lokal di Sulawesi Tenggara?

## **Bos Lokal dan Desentralisasi**

Istilah bos lokal merujuk kepada broker-broker lokal yang menikmati posisi monopolistik atas cara kekerasan dan sumber ekonomi dalam

<sup>14</sup> Detiknews. “Ini Kekayaan Gubernur Sulawesi Tenggara yang Disebut Berekening Gendut”, 17 Desember 2014, <http://news.detik.com/berita/2780376/ini-kekayaan-gubernur-sulawesi-tenggara-yang-disebut-berekening-gendut>, diakses pada tanggal 11 April 2015.

<sup>15</sup> Seruu.com, “Tersandung Skandal Seks, Gubernur Sultra Didesak Bertanggung Jawab”, 7 oktober 2013, <http://utama.seruu.com/read/2013/10/07/186164/tersandung-skandal-seks-gubernur-sultra-didesak-bertanggung-jawab>, diakses pada tanggal 18 April 2015.

wilayah kekuasaan mereka masing-masing, seperti posisi wali kota yang menjalankan daerahnya layaknya daerah kekuasaan pribadi mereka sendiri, atau kalangan kongres dan gubernur yang membangun mesin politik dan kerajaan bisnis yang merentang di seluruh distrik atau provinsi.<sup>16</sup> Para “bosisme lokal” muncul melalui mekanisme pemilu yang kompetitif dan berkala serta diikuti partisipasi politik yang tinggi. Mereka menggunakan berbagai strategi dari pembelian suara, manipulasi hingga intimidasi dengan penggunaan kekerasan.<sup>17</sup> Bosisme beroperasi dalam bayangan rezim otonomi daerah yang dicirikan oleh persekutuan birokrat, bos-bos partai, pengusaha, militer, dan preman.<sup>18</sup> Para “bosisme lokal” menggunakan aparatus negara untuk menggerakkan masyarakat agar mengikuti kehendaknya.

Bosisme lokal ada di setiap level, ada bos yang menguasai distrik (kabupaten/kota), ada bos yang menguasai provinsi dan ada bos yang menguasai pusat. Jejaring patron-klien para “bosisme lokal” tidak statis dan permanen, melainkan dinamis dan sangat cair. Mereka bisa berpindah-pindah patron di tingkat pusat, berpindah-pindah klien di tingkat lokal dan berpindah-pindah afiliasi partai politik nasional. Para “bosisme lokal” melakukan pertukaran (transaksional) suara pemilih dengan bantuan ekonomi, bibit, irigasi, pelunasan hutang dan alat tukar lainnya. Mereka sangat mengerti dengan memberikan bantuan kesehatan, memberikan bantuan pekerjaan, memberikan bantuan hukum, maka kemudian ketika hari H pemilihan umum, mereka mengubah bantuan-bantuan yang mereka berikan menjadi suara dan dukungan politik.<sup>19</sup>

Berbagai strategi dilakukan “bosisme lokal” untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politiknya. Strategi tersebut diantaranya: (1) Menempatkan kerabat dan kroni sebagai walikota, wakil walikota dan anggota legislatif

daerah; (2) Membentuk mesin politik sebagai broker suara; (3) Mengatur penempatan pejabat daerah; (4) Mengatur proyek pemerintah dan dana aspirasi; (5) Mengatur peraturan daerah; (6) Mengatur keringanan pajak; (7) Mengatur pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah; (8) Memberikan konsesi dan kontrak pertambangan, kehutanan dan perkebunan; (9) Intimidasi dan kekerasan politik; (10) Menerapkan kebijakan tangan besi untuk mengatasi konflik tanah dan melemahkan serikat buruh. Para bos lokal selain melakukan pengumpulan uang terhadap sumber daya negara juga melakukan aktivitas ekonomi ilegal seperti judi, penyelundupan, penebangan liar dan lain-lain.<sup>20</sup>

Fenomena “bosisme lokal” yang mempertahankan relasi sisa feodalisme di zaman kapitalisme dan demokrasi muncul akibat dari kebutuhan ekonomi yang konkrit dan langsung dibutuhkan, ketimpangan sosial yang sangat tinggi dan kelangkaan akses terhadap barang kebutuhan pokok. Penyebab yang lain adalah kegagalan kekerabatan masyarakat bekerja dan meningkatnya individualisme masyarakat, kegagalan aparat desa, aparat kota, aparat provinsi dan aparat pemerintah lainnya untuk menjamin kebutuhan subsistem (bertahan hidup) rakyat. Jadi ini bukan persoalan budaya politik tetapi lebih tepatnya sangat struktural.<sup>21</sup>

John Sidel memberikan catatan kritis mengenai teori “orang kuat lokal” Joel Migdal. Pertama, sifat dasar negara dan sifat dasar masyarakat yang menyebabkan “orang kuat lokal” tumbuh dan berkembang. Kedua, kebangkitan “orang kuat lokal” dari dalam negara dan dari dalam masyarakat. Ketiga, struktur negara yang menciptakan kondisi bagi bangkit, bertahan dan berhasilnya “orang kuat lokal”. Keempat, budaya politik dan tuntutan penduduk lokal yang partikular menyebabkan munculnya “orang kuat lokal”. Kelima, persediaan (*supply*) dari “orang kuat lokal” tidak selalu mencerminkan permintaan (*demand*) dari masyarakat. Keenam, “orang kuat lokal” tidak menghambat perkembangan kapitalisme dan justru memfasilitasi dan mengambil manfaat

<sup>16</sup> Nur Iman Subono, “Raja Lokal, Bos Lokal dan Chao Pho”, 1 Desember 2006. <http://demosindonesia.org/2006/12/raja-lokal-bos-lokal-dan-chao-pho/>, diakses pada tanggal 18 April 2015.

<sup>17</sup> John T. Sidel, *Capital, Coercion and Crime : Bossism in the Philippines*, (Stanford : Stanford University Press, 1999), hlm. 1-22.

<sup>18</sup> John T. Sidel, *op.cit.*, hlm. 72.

<sup>19</sup> John T. Sidel, *op.cit.*, hlm. 1-22.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

pertumbuhan industri dan perluasan pasar di daerah kekuasaan mereka.<sup>22</sup>

John Sidel memperingatkan bahwa “orang-orang kuat lokal” (*local strongmen*) yang justru menguasai lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen dan pemilihan umum ketika terjadi desentralisasi dan demokratisasi pasca pemerintahan otoritarianisme. Di Indonesia “orang kuat lokal” dihambat kemunculannya selama Orde Baru dan dihambat juga ketika sistem pemilihan tidak langsung. Namun, apabila dilakukan perubahan sistem pemilihan menjadi pemilihan langsung maka “orang kuat lokal” dapat muncul dan berkembang di Indonesia.<sup>23</sup>

Reformasi melahirkan cabang-cabang kekuasaan baru di tingkat pusat maupun daerah, seperti partai politik baru dan penyelenggara pemerintah daerah (desentralisasi). Lahirnya partai politik secara otomatis melahirkan ketua partai politik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian halnya dengan desentralisasi yang memberikan kewenangan yang luas kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengatur daerahnya sendiri. Desentralisasi mendorong lahirnya pemimpin daerah melalui rekrutmen politik secara inklusif. Namun demikian, pemberian desentralisasi tidak otomatis melahirkan demokratisasi, justru sebaliknya memunculkan praktek korupsi, korupsi, kekerasan politik, yang dahulu menjadi kebiasaan rezim Orde Baru. Nordholt, Klinken, dan Hogeboom mengutarakan hal ini, bahwa desentralisasi tidak otomatis membuahkan demokratisasi, *good governance*, dan penguatan masyarakat sipil di tingkat daerah. Sebaliknya, seringkali kita menyaksikan desentralisasi korupsi, kolusi dan tindak kekerasan politis yang di masa lampau menjadi bagian dari rezim sentral Orde Baru, dan yang sekarang dibangun dilembagakan ke dalam pola-pola patrimonial yang sudah ada di tingkat daerah.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> John T. Sidel, *op.cit.*, hlm. 53-57.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Henk Schulte Nordholt, Gerry Van Klinken dan Ireen Karang-Hogeboom, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: YOI, 2007), hlm. 24-25.

## **Kemunculan Nur Alam Sebagai Bos Lokal di Sulawesi Tenggara**

### **1. Nur Alam dan Struktur Sosial Masyarakat Sultra**

Nur Alam lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya pegawai kehutanan golongan rendahan, ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Nur Alam merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara.<sup>25</sup> Masa kecil<sup>26</sup> dan SD Nur Alam ia lewati di tanah kelahirannya, Konda. Nur Alam menamatkan SMP dan SMA di Kendari. Ketika SMA Nur Alam mulai merintis usaha. Setamat SMA, Nur Alam melanjutkan studi di fakultas ekonomi UHO. Saat mahasiswa, semangat bisnis Nur Alam semakin tumbuh, selain kuliah ia menjadi kontraktor di PT. Pertiwi Agung, lalu pindah kerja di PT. Timbel Mas. Berbekal pengalaman kerja pada dua perusahaan kontraktor, Nur Alam mencoba mandiri dengan mendirikan PT. Tamalakindo Puri Perkasa, perusahaan yang dikemudian hari sukses menjadikannya pengusaha handal.

Pada tahun 1993, Nur Alam meraih gelar Sarjana Ekonomi dan sejak itu ia semakin fokus membangun usahanya. Ia mulai mulai gencar melakukan lobi-lobi ke berbagai instansi pemerintah. Secara perlahan PT. Tamalakindo Puri Perkasa mulai dipercaya mengerjakan proyek-proyek kontraktual milik pemerintah. Profesi yang digeluti oleh Nur Alam membawanya ia tergabung dalam organisasi profesi, seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) dan Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda). Pada dua organisasi Gapensi dan Kadinda, Nur Alam dipercaya menjadi ketua.

Pada tahun 1994, Nur Alam menikah dengan istrinya, Asnawati Hasan<sup>27</sup>. Tina Nur Alam sapaan Asnawati Hasan adalah anak mantan Wakil Ketua DPRD Sultra tahun 1966-1970, H. Abdul Hamid

<sup>25</sup> Yamin Indas, “Memacu Diri Hingga Mencapai Puncak”, 27 Juni 2013, <http://yaminindas.com/?p=520>, diakses pada tanggal 17 April 2015.

<sup>26</sup> Butonsultra.com, “Profil H. Nur Alam SE M.Si Gubernur Ke 9 Sultra 2008-2018”, 2013. <http://infoduniaraya.blogspot.co.id/2014/08/profil-h-nur-alam-se-msi-gubernur-ke-9.html> diakses pada tanggal 17 April 2015.

<sup>27</sup> Yamin Indas, “Selamat Berulang Tahun Gubernur Nur Alam”, 8 Juli 2015. <http://yaminindas.com/?p=1272>, diakses pada tanggal 17 April 2015.

Hasan, yang juga salah satu tokoh pendiri Sultra. Ibunda Tina Nur Alam adalah saudara kandung mantan Bupati Kendari (kini Konawe), Drs H. Andrey Jufri periode 1977-1988.<sup>28</sup> Pernikahan dengan anak mantan pejabat dan keluarga pejabat menghadirkan trah kepemimpinan dalam keluarga Nur Alam yaitu Tina Nur Alam, bukan pada sosok Nur Alam<sup>29</sup>, yang belakangan terpilih menjadi gubernur Sulawesi Tenggara.

Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi yang terbagi atas daratan dan kepulauan. Wilayah daratan Sulawesi Tenggara dikategorikan lebih maju dibanding wilayah kepulauan.<sup>30</sup> Wilayah daratan banyak dihuni oleh orang Tolaki (penduduk asli Kendari) yang memiliki kebiasaan bertani. Sementara wilayah kepulauan dihuni oleh suku Muna, Buton dan suku kecil lainnya yang memiliki kebiasaan bertani, nelayan (pelaut) serta berdagang.

Selain orang daratan dan kepulauan, Sulawesi Tenggara juga dihuni oleh orang-orang pendatang dari berbagai daerah, seperti Bugis, Makassar, Jawa, Bali dan lainnya. Berdasarkan kenyataan itu, maka masyarakat Sulawesi Tenggara termasuk dalam tipe masyarakat multi etnis. Hasil sensus penduduk BPS tahun 2000 memperlihatkan, kelompok etnis Buton merupakan yang paling banyak yaitu sebesar

414.530 (23,34%), Bugis 341.742 (19,24%), Tolaki 289.220 (16,28%), Muna 267.722 (15,07%), Jawa 124.686 (7,02%), Bali 41.886 (2,35%), Wajo 37.540 (2,11%), Makassar 33.938 (1,91%), Toraja 31.000 (1,74%), Sunda 20.112 (1,13%).<sup>31</sup>

Wilayah kepulauan dan daratan merupakan batas alamiah yang menggambarkan sebuah fenomena geografi. Dalam perkembangannya, istilah daratan dan kepulauan tidak hanya menjadi batas geografi, namun berubah menjadi kekuatan politik ketika adanya dikotomi orang daratan dan kepulauan dalam pembentukan Kabupaten Sulawesi Timur (Sulawesi Tenggara), serta persaingan kedua kelompok memperebutkan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.<sup>32</sup> Persaingan daratan dan kepulauan mengemuka kembali saat Pemilukada langsung yang mengadopsi sistem Pemilu *one man, one person, one value, one vote* (OPOVOV).

Sistem OPOVOV menjadikan suara rakyat semakin berharga, sehingga kehadiran kelompok masyarakat semakin penting. Identitas kesukuan dan kelompok dimanfaatkan sebagai modal membentuk solidaritas memenangkan pertarungan politik di Sulawesi Tenggara.<sup>33</sup> Hal ini tampak menjelang Pemilukada tahun 2008, dimana orang daratan mulai menampakkan diri (bangkit) dengan mengorganisir kelompoknya untuk menjadi orang nomor satu di Sulawesi Tenggara, setelah sebelumnya mereka hanya menjadi wakil dan satu orang menjadi gubernur.<sup>34</sup>

<sup>28</sup> Yamin Indas, "Memacu Diri Hingga Mencapai Puncak", 27 Juni 2013. <http://yaminindas.com/?p=520> diakses pada tanggal 17 April 2015.

<sup>29</sup> Nur Alam berasal dari kalangan rakyat biasa, ia bukan berasal dari keluarga Raja di kalangan orang Tolaki sebagaimana ada pada Inea Sinumo, Sabandara, Sapati pewaris tahta Raja Konawe. Nur Alam juga tidak berasal dari marga besar dan keluarga turunan pejabat di Kendari seperti ada pada Abunawas, Silondae, Konggoasa dan lainnya. Pengaruh trah/turunan penguasa dalam budaya politik tradisional Indonesia khususnya Jawa sangat diyakini. Turunan seorang Raja atau penguasa dikemudian hari kelak akan menjadi penguasa pula (pewaris). Hal ini diyakini pula oleh sebagian masyarakat Indonesia lainnya, tidak terkecuali di Sulawesi Tenggara. Uraian tentang kekuasaan dan keturunan baca Benedict. O.R. Anderson, *Kuasa-Kata. Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*, (Yogyakarta, Mata Bangsa, 1990), hlm. 82-86.

<sup>30</sup> Lihat The World Bank, Pemda Sultra, Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo (LEMLIT UNHALU), CIDA dan AusAID, *Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo*, (Jakarta: The World Bank, 2011), hlm. 18. Lihat juga Ira Irawati, dkk, "Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Serta Variabel Sumber Daya Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara," *Jurnal Teknik Industri*, (Semarang: Undip, 2008).

<sup>31</sup> Lihat Riwanto Tirtosudarmo, *Desentralisasi dan Good Governance di Sulawesi Tenggara: Peran Akademisi dan Intelektual dalam Proses Pemekaran Wilayah*, (Jakarta: LIPI, 2006), hlm. 56-57. Lihat pula Sumedy Andono Mulyo et.al, *Data dan Informasi Dalam Rangka Penyusunan Rancangan RPJMN 2010-2014 Berdimensi Ruang dan Wilayah Sulawesi*, (Jakarta: Bappenas, 2009), hlm. 25-26.

<sup>32</sup> Baca Said D, *Pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara 1950-1978: Studi Konflik dan Integrasi*, Tesis Program Studi Ilmu Sejarah Pascasarjana Universitas Indonesia, (Jakarta: UI, 1997)

<sup>33</sup> Lihat Riwanto Tirtosudarmo, *Mencari Indonesia 2: Batas-Batas Rekayasa Sosial*, (Jakarta: LIPI Press, 2010), hlm. 55. Lihat juga Eka Suaib, *Etnisitas Kebijakan Publik (Studi Pemanfaatan Etnis Dalam Arena Politik Lokal di Kota Kendari)*, Disertasi, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2005). Lihat juga La Husen Zuada, *Desentralisasi dan Gerakan Sosial: Studi Polarisasi Gerakan Advokasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kendari Tahun 2008*, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), hlm. 157-161.

<sup>34</sup> Orang daratan secara kuantitas merupakan etnis terbesar

Hal yang sama terjadi pula pada orang-orang kepulauan (Muna-Buton).<sup>35</sup> Fenomena semacam ini menunjukkan budaya politik masyarakat Sulawesi Tenggara masih bersandar pada kekuatan primordial untuk memenangkan sebuah pertarungan.

Penduduk Sulawesi Tenggara setiap tahun mengalami peningkatan. Hasil survei BPS tahun 2013 mencatat penduduk Sulawesi Tenggara berjumlah 2.318.600 jiwa. Lebih dari 13 % (301.710 jiwa) jumlah penduduk dalam kategori miskin dengan persentase terbesar berada di wilayah pedesaan. Kondisi ini semakin pelik yang dalam hal ini, 50.669 penduduk angkatan kerja, tidak memiliki pekerjaan pada tahun 2012. Jumlah pengangguran ini mengalami peningkatan, jika dibanding dengan tahun 2011.<sup>36</sup>

Salah satu faktor peningkatan pengangguran diakibatkan semakin menurunnya serapan pekerjaan di sektor pertanian. Tren penurunan sektor yang menjadi profesi mayoritas masyarakat Sultra ini terjadi sejak tahun 2008. Sebaliknya, di sektor pertambangan, penggalian, perdagangan, hotel dan restoran dan jasa-jasa mengalami peningkatan. Meskipun sektor perdagangan mengalami peningkatan, namun masyarakat Sulawesi Tenggara tidak memiliki kebiasaan berdagang (pengusaha). Kalaupun ada yang memilih menjadi pengusaha, profesi ini masih terpantau kecil jumlahnya dan biasanya hanya ada pada suku-suku pendatang (Bugis-Makassar) dan Buton. Sebaliknya, sebagian besar orang asli Sulawesi Tenggara lebih memilih menjadi pegawai negeri sipil. Kondisi ini menjadikan masyarakat Sulawesi Tenggara sangat tergantung pada pemerintah (Nur Alam) untuk mendapatkan pekerjaan atau meningkatkan perekonomian mereka.

---

ketiga di Sulawesi Tenggara, namun secara politik mereka tidak dominan. Sejak Sulawesi Tenggara berdiri tahun 1964 sampai tahun 2007, orang daratan hanya 4 orang yang berhasil duduk sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Posisi Gubernur dijabat oleh Abdullah Silondae (1978-1982) dan Wakil Gubernur dijabat oleh Jacob Silondae (1965-1966), Hoesein Efendi (1992-2003) dan Yusran Silondae (2003-2007).

<sup>35</sup> Lihat Henny Warsilah (Ed), *Sikap Anarkitis dan Tindak Kekerasan Masyarakat Dalam Iklim Demokrasi*, (Jakarta: LIPI, 2006), h, 120. Lihat Riwanto Tirtosudarmo, *op.cit.*

<sup>36</sup> BAPPEDA Sultra, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014*, hlm. 84-87.

## 2. Nur Alam Dalam Pusaran Politik Sultra

Aktivitas politik Nur Alam dimulai sejak 1992, ketika itu ia bersama sejumlah tokoh senior mendirikan Badan Musyawarah Antar Tokoh Masyarakat (BMATM) Sultra. Organisasi ini sering memberikan kritik terhadap kepemimpinan Gubernur Sultra saat itu La Ode Kaimoeddin. Selain itu, Nur Alam juga aktif dalam Kosgoro Sultra dengan menjabat sekretaris. Kosgoro sendiri merupakan sebuah organisasi pendukung Golkar di zaman Orde Baru.

Di era reformasi, Nur Alam menjadi anggota Komite Persiapan Pembentukan Wilayah (KPW), embrio pembentukan PAN Sultra. Anggota KPW berasal dari berbagai latar belakang, diantaranya pensiunan PNS, politisi, akademisi dan tokoh masyarakat. Beberapa tokoh yang terlibat dalam KPW seperti La Imu (Tokoh Muhammadiyah/ Tokoh Masyarakat), Habil Marati (Tokoh Masyarakat), La Aouwu (Tokoh Masyarakat), Arbab Poebka (Akademisi/pengacara), Nur Alam (Politisi), *Andrey Jufri* (Politisi). Tugas dari KPW yakni menyelenggarakan Muswil dan deklarasi PAN Sultra.

Muswil I PAN Sultra berhasil memilih Andre Jufri sebagai ketua dan menempatkan Nur Alam sebagai sekretaris. Kepemimpinan Andrey Jufri sebagai ketua DPW PAN Sultra hanya berlangsung dua tahun, selanjutnya pada Muswil II yang digelar pada tanggal 27 Juli Tahun 2000, Nur Alam terpilih sebagai ketua DPW PAN. Terpilihnya Nur Alam menjadi ketua tidak mengagetkan, karena sejak awal terbentuk ia sudah menjadi sekretaris PAN. Latar belakang pengusaha yang digeluti oleh Nur Alam menjadi salah satu faktor keterpilihannya untuk memperkuat basis pendanaan partai.

Aktivitas politik dan jabatan ketua DPW PAN Sultra yang dipegang oleh Nur Alam menjadikannya akrab dengan para elit politik nasional, khususnya petinggi PAN, seperti Amin Rais, Hatta Rajasa, Bambang Soedibyo, Yahya Muhaimin, Malik Fajar dan sejumlah petinggi PAN lainnya di era presiden Gus Dur hingga SBY. Dari sini, ia mulai merambah proyek-proyek besar berskala nasional di beberapa daerah di Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Nur Alam, PAN Sultra secara perlahan mengalami peningkatan

suara dan kursi di legislatif yang sangat signifikan. Tiga periode Pemilu digelar—2004, 2009, 2014—perolehan suara dan kursi PAN terus mengalami peningkatan. Penambahan kursi terlihat di level DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota se Sulawesi Tenggara (Lihat Tabel 1). Pencapaian PAN dalam tiga Pemilu ini terbilang fantastis karena pada Pemilu 1999, PAN hanya mendudukkan 1 anggota DPRD Provinsi. Raihan suara signifikan mengantarkan Nur Alam menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi dan beberapa saat kemudian ia terpilih sebagai Ketua KONI Sultra.

Kesibukan Nur Alam di DPRD dan mengelola bisnis mulai terbagi dengan keinginannya untuk maju menjadi Calon Gubernur Sultra Periode 2008-2013. Cita-cita ini telah dipersiapkan Nur Alam sejak tahun 2003, ketika itu diawali polemik terpilihnya Ali Mazi (suku Buton) sebagai Gubernur Sultra yang menurutnya tidak memiliki kontribusi politik di Sulawesi Tenggara, meskipun berasal dari Sultra. Saat itu, Nur Alam tidak setuju dengan munculnya Ali Mazi, sehingga ia mengorganisir sejumlah unjuk rasa menolak Ali Mazi. Namun demikian, usaha Nur Alam mengalami kegagalan setelah mayoritas DPRD yang dikuasai oleh Golkar memilih Ali Mazi. Atas peristiwa kekalahan ini, Nur Alam mengikrarkan diri untuk melawan Ali Mazi pada pemilihan gubernur 5 tahun kemudian (2008).

Demi mencapai cita-citanya, Nur Alam mulai mencetak baliho yang bertuliskan “*Nur Alam – Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2008-2013*”. Selain itu, Nur Alam juga meminta dukungan dari keluarga hingga para politisi nasional. Salah satu tokoh yang dimintai pendapat oleh Nur Alam adalah Andrey Jufri (Mantan Bupati Konawe/Ketua DPW PAN I) yang juga paman istrinya. Nur Alam juga melakukan diskusi dengan rekan-rekannya di PAN Sultra, termasuk dengan Arbab Paproeka, Sukarman A.K, H. Rahman Saleh, Umar Samiun, Nur Amin dan lain-lain. Selanjutnya Nur Alam menemui Hatta Rajasa, saat itu ia diperkenalkan dengan salah satu konsultan politik Jaringan Survey Indonesia (JSI), Widdi Aswindi<sup>37</sup> yang belakangan menjadi Direktur

<sup>37</sup> Syarlin Syamsudin, “Nur Alam Selayang Pandang”, 23 September 2012 <http://brigadenuralam.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 17 April 2015.

PT Billy Indonesia, sebuah perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana. Melalui Widdi, Nur Alam mendapatkan masukan-masukan teknis, terkait bagaimana memulai dan memenangkan pertarungan.

Setelah berkonsultasi dengan JSI, Nur Alam mulai mencetak berbagai alat peraga kampanye. Nur Alam juga mulai membangun modal sosial<sup>38</sup> kepada pemilih dengan melakukan kunjungan dan pertemuan dengan beberapa kelompok masyarakat seperti ibu-ibu pengajian dan kelompok paguyuban Taman Pemuda dan Mahasiswa Tolaki (Tamalaki)<sup>39</sup> yang tersebar di Sulawesi Tenggara. Kedekatan Nur Alam dengan kelompok etnis Tamalaki dikisahkan oleh salah satu narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh Aryuni.

“Saya sering melihat N.A datang ke Markas Tamalaki. Waktu itu beliau masih belum menjadi gubernur, masih dalam proses pencalonan. Dari cerita-cerita anak kos, N.A sering memberi bantuan dana pada kelompok Tamalaki”.<sup>40</sup>

Pada Pemilihan Gubernur 2008, paguyuban Tamalaki menjadi salah satu pendukung setia Nur Alam. Dalam perjalanannya, Tamalaki tidak hanya menjadi tim sukses Nur Alam, namun juga menjadi pengawal berbagai kebijakan pemerintahannya. Bagi mereka yang mengganggu Nur Alam, maka akan berhadapan dengan kelompok Tamalaki, karena Nur Alam dipandang sebagai representasi orang Tolaki. Pengorganisasian kelompok etnis ini tampak relevan dengan penyelenggaraan Pemilu 2008 secara langsung, dimana suara rakyat menjadi semakin penting, terlebih lagi Etnis Tolaki merupakan etnis terbesar ketiga di Sulawesi Tenggara setelah Buton dan Bugis.

<sup>38</sup> Menurut Bourdieu dan Wacquant, modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik pengenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan. Lihat John Field, *Modal Sosial*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), hlm. 23.

<sup>39</sup> Tamalaki sesuai dengan namanya adalah paguyuban yang mewakili etnis Tolaki. Lihat, La Husen Zuada, *op.cit*, hlm. 83.

<sup>40</sup> Lihat Aryuni Salpiana Jabar, *Perilaku Politik Etnis Tolaki Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2007 (Kasus: Kubu Nusa Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2007)*, Tesis, (Bogor: IPB, 2009), hlm. 74.

Pada tanggal 18 Agustus 2007, DPRD Sultra mengeluarkan surat pemberitahuan kepada KPUD tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra. Selanjutnya tahapan Pemilukada dimulai dengan penetapan jadwal Pemilukada. Bersamaan dengan itu, sejumlah figur calon Gubernur dan Wakil Gubernur mulai bermunculan, salah satunya Nur Alam-Saleh Lasata (NUSA). Pasangan NUSA merupakan perpaduan antara dua latar belakang profesi maupun etnis. Nur Alam berlatar belakang sebagai pengusaha dan berasal dari etnis Tolaki (daratan), sementara Saleh Lasata berlatar belakang militer/Bupati Muna (1995-1997)/ Ketua DPRD Sultra (1997-1999) yang berasal dari etnis Muna (Kepulauan). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Aryuni Salpiana Jabar menyebut latar belakang profesi dan etnis pasangan NUSA menjadi karakteristik pembeda dengan calon lain.<sup>41</sup> Strategi *cross cutting power*<sup>42</sup> (silang menyilang kekuatan) pasangan NUSA membuahkan hasil. Pilkada langsung yang digelar pada tahun 2007 berhasil dimenangkannya dengan perolehan suara 421.361 (42,78 %), sekaligus mengalahkan petahana saat itu Ali Mazi. Faktor penentu kemenangan pasangan NUSA adalah kuatnya solidaritas sesama etnis, khususnya Tolaki.<sup>43</sup>

Pada tanggal 18 Februari 2008, Nur Alam-Saleh Lasata dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur. Saat ditetapkan menjadi Gubernur, Nur Alam membangun citra sebagai sosok yang jauh dari kesan serakah terhadap jatah fasilitas pemerintahan dengan mengembalikan aset daerah yang dipakainya saat menjabat Wakil Ketua DPRD periode 2004-2009 kepada

pemerintah daerah. Aset yang diserahkan tersebut yakni dua unit mobil Ford Everest dan Kijang Krista.

Di era pemerintahannya, Nur Alam meluncurkan program pembangunan bernama BAHTERAMAS akronim dari Membangun Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Tenggara. Program utama BAHTERAMAS meliputi tiga sasaran yaitu: 1). Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) berlandaskan pada Peraturan Gubernur No 24 tahun 2008 tentang Pembebasan BOP Pendidikan dasar dan Menengah; 2). Pembebasan Biaya Pengobatan (PBP) berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 41 tahun 2009; dan 3). Bantuan Keuangan (*Block Grant*) kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 25a Tahun 2008.

Sekilas program BAHTERAMAS ini serupa dengan yang diutarakan oleh Sidel di awal, dimana para bos lokal melakukan pertukaran (transaksional) suara pemilih dengan bantuan ekonomi, bibit, irigasi, pelunasan hutang dan alat tukar lainnya. Hal yang membedakan adalah wujud dari BAHTERAMAS berupa pendidikan gratis, kesehatan gratis dan bantuan anggaran untuk desa. Dalam istilah Aspinal<sup>44</sup> program BAHTERAMAS termasuk jenis *programmatic goods*, karena penyaluran bantuan sifatnya fisik dan pelayanan sosial. Bagi masyarakat yang menerimanya, hal itu dianggap sebagai hadiah (*gift*) dan tentu saja ia perlu membalasnya.

Setiap kunjungan kerja ke daerah, Nur Alam mampu menjawab aspirasi dan tuntutan masyarakat dengan langsung menjawab saat itu juga, tidak memberi janji tapi memberi solusi. Desa yang butuh traktor dibelikan traktor, jika ada yang minta dibangun masjid langsung diberi dana bantuan saat itu juga. Melalui program BAHTERAMAS Nur Alam mampu menjaga kepatuhan pemilih untuk memberikan suara kepadanya karena telah menerima hadiah dan pelayanan.<sup>45</sup> Simbol yang ditampilkan adalah

<sup>41</sup> Lihat Aryuni Salpiana Jabar, *op.cit*, hlm. 39-43; Riwanto Tirtosudarmo, *op.cit*, hlm. 68; Sutoro Eko, *Benih Perubahan Di Atas Fondasi Politik Yang Rapuh (Studi Tentang Politik Anggaran Daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara)*, (Yogyakarta: IRE, 2008).

<sup>42</sup> *Cross cutting power* adalah perpaduan dua kekuatan dalam ajang pemilihan (Pemilu Presiden dan Pemilukada). Istilah ini pertama kali diutarakan oleh M. Dahrim Laode dalam disertasi penelitiannya pada program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia. Lihat M.D Laode, *Etnis Cina Indonesia Dalam Politik di Era Reformasi: Studi Kasus Keterlibatan Kelompok Etnis Cina Indonesia Dalam Politik di Kota Pontianak dan Kota Singkawang Kalimantan Barat 1998-2008*, Disertasi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011).

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 39-43.

<sup>44</sup> Edward Aspinal, "When Brokers Betray: Clientalism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia", *Critical Asian Studies* 46, 2014.

<sup>45</sup> Eka Suaib, "Institusionalisasi Partai Politik (Studi Kasus Hegemoni PAN Di Sulawesi Tenggara)", Makalah disampaikan

simbol membantu masyarakat miskin dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan uang tunai. Nur Alam seakan-akan tampil seperti ‘sinterklas’ yang membagi-bagikan hadiah untuk anak-anak.

Pola patron-klien yang dilandasi prinsip utilitarianisme telah tercipta dalam hubungan Gubernur dan masyarakat Sultra. Masyarakat umum yang telah terbiasa dengan bantuan-bantuan dari sang Gubernur secara tidak langsung telah menjadi *client* yang siap memberi dukungan kepadanya karena telah memberi “manfaat” bagi mereka. Personalitas Nur Alam sebagai pengusaha terkenal yang memiliki solidaritas sosial tinggi, menjadi daya tarik tersendiri. Dengan tingginya rasa solidaritas sosial, telah membentuk citra Nur Alam sebagai seorang altruis, seorang pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan dirinya sendiri.

Program BAHTERAMAS masuk dalam salah satu tipologi *money politic*<sup>46</sup>. Jonathan Hopkin<sup>47</sup> menyebut program semacam BAHTERAMAS sebagai klientisme, yaitu bentuk pertukaran *dyadic* dan personal yang biasanya ditandai dengan perasaan berkewajiban, dan sering juga oleh keseimbangan kekuasaan yang tidak setara antara mereka yang terlibat. Lebih lanjut, model pertukaran ini termasuk dalam klientisme lama yaitu bentuk pertukaran sosial dan politik, dimana ia melibatkan prinsip bahwa satu orang memberikan perlakuan khusus pada orang lain dengan harapan akan ada imbalan di masa depan. Klientisme politik ini sangat mempengaruhi pemilih pada masyarakat yang miskin.

Program BAHTERAMAS yang digagas Nur Alam menjadikan dirinya sangat populis di kalangan masyarakat Sultra. Melalui program

---

dalam seminar nasional Pilkada Serentak yang diselenggarakan FISIP Unhas, DKPP, Bawaslu RI, KPU RI, Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 11.

<sup>46</sup> Lihat La Husen Zuada, “Menciptakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Berintegritas, Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Subtansial”, Makalah disampaikan dalam Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Hotel Clarion Kendari, Sabtu 12 Agustus 2015, hlm. 3-7.

<sup>47</sup> Lihat Jonathan Hopkin, *Klientisme dan Partai Politik dalam buku Handbook Partai Politik*, (Jakarta: Nusa Media: 2014), hlm. 670.

BAHTERAMAS, Nur Alam berhasil menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta menaikkan angka partisipasi sekolah (posisi ke-2 tertinggi di Sulawesi). Secara perlahan Nur Alam muncul sebagai sosok politisi yang memiliki pengaruh kuat di Sultra. Hal ini bisa terlihat dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 dan 2014.

**Tabel. 1.** Perolehan Kursi PAN Pada Pemilu 2004,2009, 2014

| No | Tingkatan           | Perolehan Kursi Periode Pemilu |      |      |
|----|---------------------|--------------------------------|------|------|
|    |                     | 2004                           | 2009 | 2014 |
| 1  | DPR                 | 1                              | 1    | 1    |
| 1  | DPRD Provinsi       | 6                              | 7    | 9    |
| 2  | DPRD Kabupaten/Kota | 45                             | 48   | 75   |

Sumber: KPU Sultra (diolah kembali oleh Eka Suaib).

Pengaruh kuat Nur Alam tampak pula dalam Pilkada Kabupaten/Kota maupun Provinsi di Sulawesi Tenggara. Nur Alam bersama Saleh Lasata terpilih kembali sebagai gubernur periode 2013-2018 setelah menyingkirkan dua pesaingnya, Buhari Matta/Amirul Tamim dan Ridwan Bae/Khaerul Saleh. Di tingkat Kabupaten/Kota, PAN Sultra memenangkan sepuluh (10) dari dua belas (12) Pilkada yang diselenggarakan selama tahun 2010-2013. Capaian positif PAN dalam Pemilu tidak terlepas dari peran Nur Alam sebagai ketua DPW PAN dan Gubernur Sultra yang memiliki sumber daya politik dan akses terhadap birokrasi. Peran Nur Alam juga terlihat atas keberhasilannya ‘mem-PAN-kan’<sup>48</sup> para Bupati/Walikota termasuk Wakil Gubernur, Saleh Lasata yang diangkat menjadi ketua majelis pertimbangan Partai Amanat Nasional DPW Sultra. Untuk lebih lengkapnya lihat Tabel 2. berikut:

---

<sup>48</sup> Di era Nur Alam, para Bupati/Walikota banyak diangkat menjadi pengurus DPW PAN Provinsi hingga Ketua DPD PAN Kabupaten/Kota.

**Tabel. 2** Calon Bupati/Walikota dari PAN, Pemenang Pilkada se-Sultra dan Peran Nur Alam

| No  | Kabupaten/<br>Kota          | Calon Bupati/Walikota<br>PAN dan Koalisinya | Pemenang Pilkada                 | Tahun | Peran Nur<br>Alam                                  |
|-----|-----------------------------|---|----------------------------------|-------|--|
| 1   | Kabupaten<br>Konawe Selatan | Imran/ Sutoarjo Pondiu                      | Imran/Sutoarjo Pondiu            | 2010  | Mendukung  |
| 2   | Kabupaten<br>Muna           | L.M Baharuddin/ Malik<br>Ditu               | L.M Baharuddin/ Malik<br>Ditu    | 2010  | Mendukung<br>dan Mem-PAN-<br>kan Baharuddin        |
| 3   | Buton Utara                 | Ridwan Zakaria/ Harmin<br>Hari              | Ridwan Zakaria/Harmin<br>Hari    | 2010  | Mendukung<br>dan Mem-PAN-<br>kan Ridwan<br>Zakaria |
| 4   | Konawe Utara                | Aswad Sulaiman/<br>Ruksamin                 | Aswad<br>Sulaiman/Ruksamin       | 2011  | Mendukung  |
| 5   | Wakatobi                    | Hugua/Arhawi                                | Hugua/Arhawi                     | 2011  | Mendukung  |
| 6   | Bombana                     | Tafdil (kader PAN)/<br>Mashyura             | Tafdil/Mashyura                  | 2011  | Mendukung  |
| 7   | Kota Kendari                | Asrun/ Musadar<br>Mappasomba                | Asrun/Musadar<br>Mappasomba      | 2012  | Mendukung<br>dan Mem-PAN-<br>kan Asrun             |
| 8   | Kabupaten<br>Buton          | Samsu Umar Samiun<br>(kader PAN)/ La Bakry  | Samsu Umar Samiun/La<br>Bakry    | 2012  | Mendukung  |
| 9*  | Kolaka Utara                | Anton/H.Abbas                               | Rusda Mahmud/Bobby<br>Alimuddin  | 2012  | -  |
| 10  | Kota Bau-Bau                | Tamrin/ Wa Ode Masra<br>Manarfa             | Tamrin/ Wa Ode Masra<br>Manarfa  | 2013  | Mendukung<br>dan Mem-PAN-<br>kan Tamrin            |
| 11  | Konawe                      | Kerry Konggoasa (kader<br>PAN)/ Pasinringi  | KerryKonggoasa/Pasinri<br>ngi    | 2013  | Mendukung  |
| 12* | Kolaka                      | Amir Sahaka/ Rais Galu                      | Ahmad Safei/<br>Fachruddin Rahim | 2013  | -  |

Sumber: KPU Sultra (dimodifikasi Eka Suaib).

*Keterangan:* \* (Kabupaten yang tidak dimenangkan oleh PAN dan koalisinya)

Meskipun sangat hegemoni, sosok Nur Alam dapat dikatakan sebagai pemimpin yang berhasil membangun Sultra. Hegemoni politik Nur Alam tidak serta menimbulkan efek negatif bagi kelangsungan negara. Dalam arti, negara tidaklah menjadi lemah perannya, justru semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian perekonomian Sultra selama 4 tahun dipimpin Nur Alam (2008-2012) terus mengalami kenaikan. Ini diperlihatkan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8,42 persen dan kenaikan rata-rata mencapai 0,79 persen setiap tahunnya. Sementara angka kemiskinan Sulawesi Tenggara terus

mengalami penurunan dari 19,53 persen tahun 2008 menjadi 12,83 persen tahun 2013.<sup>49</sup>

Di era Nur Alam, infrastruktur fisik semakin membaik, seperti peningkatan kualitas ruas jalan dan jembatan—Poros Konda, Poros Kolaka-Kendari, Poros Buton Utara-Bau Bau, jalan dalam Kota Kendari. Kualitas transportasi laut antar pulau juga terus mengalami penambahan seperti: penambahan jumlah kapal penyeberangan Torobulu-Tampo, pembangunan pelabuhan Bungkutoko (Kota Kendari), Pelabuhan Molengo (Buton Utara-Konawe Selatan), pembangunan Pelabuhan Tondasi

<sup>49</sup> BAPPEDA Sultra, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014*, hlm. 83.

(Muna-Makassar), penyeberangan Wawonii-Kendari dan lainnya. Perhubungan udara semasa Nur Alam juga tampak semakin membaik seperti peningkatan kualitas infrastruktur Bandara Halu Oleo, berfungsinya bandara Mataohara (Wakatobi), Betoambari (Bau-Bau), Sugi Manuru (Muna), Sangia Nibandera (Kolaka).

### 3. Dominasi Kekuasaan Nur Alam dan Para Penentangannya

Sebagai gubernur, Nur Alam memiliki misi mengejar keteringgalan Sulawesi Tenggara dari daerah lain. Misi itu diupayakan oleh Nur Alam dengan mengundang investor untuk berinvestasi di Sulawesi Tenggara. Salah satu pengusaha yang tertarik dengan ajakan Nur Alam adalah James Riady, pemilik Lippo Grup, yang menanam investasi di bidang pasar modern (Lippo Hypermart). Pembangunan Lippo Hypermart sempat menjadi pro kontra di kalangan aktivis Sultra, karena di lokasi/lahan pembangunan, telah berdiri gedung Pramuka dan KNPI. Namun pada akhirnya upaya para aktivis kalah kuat, pembangunan Lippo Hypermart tetap dilanjutkan dengan menghancurkan gedung Pramuka dan KNPI.

Kekayaan alam dimiliki Sultra diminati oleh investor dari dalam dan luar negeri. Salah satunya usaha pertambangan yang menggeliat sejak tahun 2008. Potensi ini menjadi alasan Nur Alam mengusulkan Sultra sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tambang pada pemerintah pusat, sebagaimana tertuang dalam UU No. 39 Tahun 2009 tentang KEK. Usulan KEK Tambang ini mendapatkan tantangan dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Tata Ruang Wilayah (FTRW) Sultra<sup>50</sup> (gabungan LSM dan Pemerhati Sultra), Walhi Sultra, KPI Sultra, mahasiswa Universitas Halu Oleo<sup>51</sup>, serta politisi PAN asal Sulawesi Tenggara Waode Nur Hayati<sup>52</sup>.

<sup>50</sup> Antara Sulsel, "FTRW Tolak Sultra Jadi Kawasan Pertambangan Nasional", 25 Januari 2011, <http://www.antarasulsel.com/berita/24029/ftwr-tolak-sultra-jadi-kawasan-pertambangan-nasional> diakses pada tanggal 18 April 2015.

<sup>51</sup> Berita Lingkungan, "Mahasiswa Kendari Tolak Kawasan Ekonomi Khusus", 24 Maret 2011. <http://www.beritalingkungan.com/2011/03/mahasiswa-kendari-tolak-kawasan-ekonomi.html>, diakses pada tanggal 21 September 2015.

<sup>52</sup> JPPN.com, "Pemprov Sultra Diminta Jujur soal KEK Pertambangan", 26 Januari 2011 <http://www.jpnn.com/>

Para penentang beralasan, tambang lebih banyak mendatangkan masalah bagi masyarakat dan tidak cocok dengan karakteristik Sulawesi Tenggara sebagai daerah pertanian dan perikanan. Namun demikian, penentangan yang dilakukan oleh FTRW, mahasiswa dan politisi mendapat hambatan, setelah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI, Kamaruddin sebagai anggota DPD RI dan Laode Djeni Hasmar sebagai Ketua Kerukunan Sulawesi Tenggara (KKST) mendukung usulan Gubernur Sultra tersebut.<sup>53</sup>

Pada satu sisi, kelompok penentang semakin melemah. Pelemahan terjadi pada gerakan mahasiswa di Universitas Halu Oleo (UHO) akibat adanya aksi teror psikologis (SMS ancaman pembunuhan) maupun fisik (pemukulan aktivis) oleh kelompok preman saat berdemonstrasi menolak KEK. Di sisi lain, Waode Nur Hayati yang berbeda pandangan dengan Nur Alam, semakin tidak mendapat dukungan seiring dengan isu yang menjerat dirinya dalam kasus permainan anggaran di DPR. Keterlibatan Waode ini tidak memiliki kaitan dengan sikap kontra dengan Nur Alam, namun demikian peristiwa ini secara tidak langsung memberi pesan kepada lawan-lawan politik Nur Alam agar tidak berbeda pandangan dengannya.

Sejak Sulawesi Tenggara dicanangkan sebagai KEK tambang, telah memicu pertumbuhan masif izin usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara. Hingga tahun 2012, jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara mencapai 341 (tiga ratus empat puluh satu).<sup>54</sup> Dahulu sebagian lokasi izin usaha pertambangan ini tidak dibolehkan karena masuk dalam wilayah hutan lindung, namun ini berhasil diterobos atas sokongan perlakuan khusus yang tertuang dalam UU KEK.

[read/2011/01/26/82898/Pemprov-Sultra-Diminta-Jujur-soal-KEK-Pertambangan-diakses-pada-tanggal-19-September-2015](http://www.jpnn.com/read/2011/01/26/82898/Pemprov-Sultra-Diminta-Jujur-soal-KEK-Pertambangan-diakses-pada-tanggal-19-September-2015).

<sup>53</sup> JPPN.com, "KEK di Sultra Direspon Positif", 24 Januari 2011 <http://www.jpnn.com/read/2011/01/24/82703/KEK-di-Sultra-Direspon-Positif> diakses pada tanggal 19 September 2015.

<sup>54</sup> Asman Sahaludin, "341 IUP Pertambangan di Sulawesi Tenggara; Rahmat atau Petaka", 4 Agustus 2012, [http://www.kompasiana.com/asman\\_sahaluddin/341-iup-pertambangan-di-sulawesi-tenggara-rahmat-atau-petaka\\_5512dddca33311dd67ba7df3](http://www.kompasiana.com/asman_sahaluddin/341-iup-pertambangan-di-sulawesi-tenggara-rahmat-atau-petaka_5512dddca33311dd67ba7df3), diakses pada tanggal 19 November 2013.

Penetapan Sultra sebagai KEK tambang dimanfaatkan oleh sejumlah pejabat lokal di Sultra (Gubernur dan Bupati) untuk memainkan pengaruhnya melalui pemberian izin usaha pertambangan, hal inilah yang tampak pada Nur Alam. Berkat sokongan aturan negara—UU No. 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010—gubernur Nur Alam memiliki peran strategis memberikan izin usaha pertambangan di wilayah perbatasan Kabupaten. Dugaan permainan dalam izin usaha tambang ini kemudian menjadikan Nur Alam masuk dalam pantauan PPAK atas kepemilikan ‘rekening gendut’ sebesar US\$ 4,5 juta.<sup>55</sup>

Investigasi majalah Tempo menyebut ‘rekening gendut’ Nur Alam diduga berasal dari Mr. Chen, seorang pengusaha tambang asal Taiwan yang memiliki hubungan bisnis dengan PT. Billy Indonesia, perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra. Belakangan PT. Billy Indonesia diketahui milik Widdi, pimpinan Jaringan Suara Indonesia, konsultan politik Nur Alam ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur tahun 2007 dan 2012.<sup>56</sup>

Sumber Tempo menyebut, siklus aliran uang yang diterima oleh Nur Alam tidak dikirim langsung oleh Mr. Chen, namun melalui Richcorp International Limited, perusahaan yang berbasis di Hongkong. Richcorp International Limited pada medio September-november 2010 melakukan empat kali transfer uang dengan nilai total US\$ 4,5 juta. Transfer uang sebesar itu dilakukan melalui Chinatrust—sebuah Bank Comercial Hong Kong—ditujukan ke PT. AXA Mandiri yang ditempatkan dalam 3 polis asuransi atas nama Nur Alam. Anehnya setelah dilakukan pengecekan, Richcorp ternyata sudah tutup buku sejak 24 Oktober 1997.<sup>57</sup>

Pasca majalah Tempo merilis rekening gendut, kalangan aktivis Sultra merespons

<sup>55</sup> Tempo.co, “Kasus Rekening Gendut, Nur Alam Tunjuk Para Bupati”, 24 Desember 2014 <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/24/063630803/kasus-rekening-gendut-nur-alam-tunjuk-para-bupati>, diakses pada tanggal 17 September 2015.

<sup>56</sup> Syarlin Syamsudin, “Nur Alam Selayang Pandang”, 23 September 2012 <http://brigadenuralam.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2015.

<sup>57</sup> Majalah TEMPO, “Putar-Putar Duit Nikel dan Politik Bisnis Sang Gubernur” edisi 8-14 September 2014.

dengan berbagai aksi demonstrasi. Demonstrasi dilakukan oleh Solidaritas Pekerja Tambang Nasional (Spartan) dan Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (AMST) yang meminta pihak berwenang mengusut kasus rekening gendut Gubernur.<sup>58</sup> Aksi demonstrasi AMST dan Spartan berakhir dengan anti klimaks setelah sekelompok preman bersenjata yang membawa *sound system* membubarkan paksa para demonstran dan menyuarakan pembelaannya terhadap Nur Alam.<sup>59</sup>

Buntut dari pemberitaan Tempo, Nur Alam menjadi semakin sensitif terhadap media. Tindakan kekerasan dan pelecehan dilakukan pada wartawan Tempo, saat ingin melakukan wawancara dengan gubernur Nur Alam terkait rekening gendut. Kasus kekerasan terhadap wartawan Tempo dilaporkan ke polisi, meskipun sampai saat ini status laporan itu tidak memiliki kejelasan.<sup>60</sup> Sebelumnya, ketidakharmonisan antara wartawan dan gubernur yang berujung pada somasi, pernah terjadi ketika Nur Alam mengeluarkan pernyataan bernada melecehkan terhadap wartawan.<sup>61</sup> Belakangan persoalan hukum antara wartawan dan gubernur dianggap selesai, setelah gubernur melakukan pertemuan dengan para pimpinan redaksi media.<sup>62</sup> Para jurnalis yang bernaung di bawah AJI menyangkan cara penyelesaian yang dilakukan oleh gubernur. Menurut mereka, gubernur harusnya mengundang wartawan bukan para pemimpin redaksi.

<sup>58</sup> Gatranews, “Spartan: Tangkap Ribuan Preman Pembubar Aksi Demo”, 20 Februari 2014, <http://www.gatra.com/nusantara-1/sulawesi-1/47573-spartan-tangkap-ribuan-preman-pembubar-aksi-demo.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2015.

<sup>59</sup> Tindakan premanisme dan intimidasi terhadap para aktivis yang mengkritik penguasa di Sulawesi Tenggara merupakan peristiwa yang lazim ditemukan. Uraian lebih lengkap lihat tulisan Henny Warsilah, *Perjalanan Demokrasi Provinsi Sulawesi Tenggara vs Premanisme Ala Orde Baru*, (Jakarta: LIPI, 2006). Lihat pula, La Husen Zuada, *Desentralisasi dan Gerakan Sosial*, *op. cit.*

<sup>60</sup> Wawancara dengan Q, salah satu jurnalis yang bernaung di AJI, pukul 09.00 WITA tanggal 20 Oktober 2010.

<sup>61</sup> Nur Alam mengeluarkan pernyataan “kalau saya, tinggal saya tidak cebok (membersihkan pantat) media”. Oleh para wartawan pernyataan gubernur ini melecehkan dan bisa memunculkan anggapan bahwa media di Sultra sudah dibeli oleh Gubernur.

<sup>62</sup> Wawancara dengan X, salah satu jurnalis yang bernaung di AJI, pukul 09.00 WITA tanggal 20 Oktober 2010.

Upaya pengusutan dugaan rekening gendut Gubernur Sultra telah berlangsung sejak adanya rilis PPAK tahun 2011, namun demikian, sampai hari ini tidak mendapat kejelasan dari Kejaksaan Agung, KPK atau Polri, sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan. Fenomena ini menunjukkan Nur Alam sangat kebal terhadap pengusutan dugaan kasus hukum yang menjeratnya. Dikalangan politisi Sultra, Nur Alam juga tampak sangat disayangi sebagaimana pengakuan Laode Ida, Mantan Wakil Ketua DPD RI. Laode diminta oleh para koleganya untuk tidak berkomentar soal Nur Alam, karena berasal dari satu daerah, pernah sama-sama di PAN dan mendukung Nur Alam saat Pilgub 2012.<sup>63</sup> Meskipun, pada akhirnya Laode enggan mengikuti permintaan para koleganya dan meminta dugaan rekening gendut Nur Alam diusut tuntas oleh pihak berwenang.

Di era pemerintahannya, Nur Alam ingin mewujudkan pembangunan jembatan Bahteramas yang menghubungkan wilayah Bungkutoko dan Kota Lama. Upaya Nur Alam kembali mendapatkan tantangan dari sejumlah aktivis mahasiswa, aktivis lingkungan hingga sejarawan Universitas Halu Oleo Basrin Melamba.<sup>64</sup> Menurut para penentang, keberadaan Jembatan Bahteramas akan menimbulkan kerusakan lingkungan, pengusuran warga dan hilangnya situs-situs sejarah yang dimiliki oleh Kota Kendari.<sup>65</sup>

Penentang kebijakan Nur Alam di Sulawesi Tenggara terus mengalami pelemahan. Pelemahan diakibatkan oleh ancaman dari kelompok preman dan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum aparat hukum. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh preman menjadi rutinitas yang

dihadapi oleh para aktivis mahasiswa dan LSM Sulawesi Tenggara.<sup>66</sup> Tindakan kriminalisasi pernah dialami oleh Titin Saranani,<sup>67</sup> salah satu aktivis perempuan Sulawesi Tenggara yang sangat kritis terhadap berbagai kebijakan Nur Alam. Kasus yang dialami Titin Saranani tidak memiliki kaitan dengan kebijakan Nur Alam, namun demikian banyak pihak menyebut bahwa penjemputan paksa oleh Polda Sultra memiliki keterkaitan dengan sikap kritisnya kepada Nur Alam. Hal ini diyakini pula oleh salah satu aktivis perempuan yang mengikuti kasus Titin Sarani.<sup>68</sup>

Ancaman juga dialami oleh para penyelenggara Pemilu yang tidak menguntungkan Nur Alam. Peristiwa ini pernah dialami oleh salah satu penyelenggara Pemilu pada Tahun 2013, ketika itu rumahnya diserang oleh kelompok bermotor setelah memutuskan suatu perkara yang dinilai merugikan Nur Alam.<sup>69</sup> Selain mampu mengorganisir kekerasan dan mengendalikan penegak hukum, Nur Alam juga berupaya mempengaruhi rekrutmen penyelenggara Pemilu dengan menitipkan orang-orangnya kepada pejabat Pusat.<sup>70</sup> Meskipun pada akhirnya, titipan itu ada yang berhasil dan tidak, namun demikian persentase keberhasilan lebih banyak dibanding kegagalannya. Dalam arti, setiap anggota penyelenggara Pemilu di Sulawesi Tenggara pernah dititip dan memiliki kedekatan dengan Nur Alam.

<sup>63</sup> JPPN.com, "La Ode Ngaku Dilarang Komentari Rekening Gendut Nur Alam", 27 Desember 2014, <http://www.jpnn.com/read/2014/12/27/277913/La-Ode-Ngaku-Dilarang-Komentari-Rekening-Gendut-Nur-Alam>, diakses pada tanggal 17 September 2015.

<sup>64</sup> CENDANA NEWS, "Kota Lama Kendari, Warisan yang Terampas Ambisi Pembangunan Jembatan", 11 Februari 2015, <http://www.cendananews.com/2015/02/kota-lama-kendari-warisan-yang-terampas.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2015.

<sup>65</sup> ANTARA SULTRA.com, "FMSB Minta Hentikan Proyek Jembatan 'Bahteramas'", 10 Desember 2011, <http://antarasultra.com/print/262827/fmsb-minta-hentikan-proyek-jembatan-bahteramas>, diakses pada tanggal 18 Mei 2015.

<sup>66</sup> Pemuda Bergerak, "Penyerangan Aktivis Mahasiswa bentuk kepanikan Gubernur Sultra", 21 Desember 2013, <https://pemudabergerak.wordpress.com/2013/12/21/penyerangan-aktivis-mahasiswa-bentuk-kepanikan-gubernur-sultra/>, diakses pada tanggal 19 September 2015.

<sup>67</sup> Kompas.com, "Sebut Anggota Panwaslu 'Gigolo' di Facebook, Wanita Ini Ditangkap", 22 Oktober 2014, <http://regional.kompas.com/read/2014/10/22/22360761/Sebut.Anggota.Panwaslu.Gigolo.di.Facebook.Wanita.Ini.Ditangkap>, diakses 19 November 2014.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Miss D, aktivis perempuan Sultra 19 November 2015.

<sup>69</sup> Korban mendunga kuat, penyerang rumahnya adalah orang-orang suruhan yang tidak puas dengan keputusan yang tidak menguntungkan salah satu pasangan Pemilu Gubernur Sultra. Wawancara dengan Miss Y, mantan penyelenggara Pemilu Sultra 17 November 2015.

<sup>70</sup> Saat penetapan komisioner penyelenggara Pemilu orang-orang dekat atau titipan Nur Alam berhasil mengisi satu posisi di struktur penyelenggara Pemilu. Wawancara dengan G, tanggal 20 November 2015.

Di kalangan elit Sultra lainnya, Nur Alam juga mendapatkan tantangan yang keras, seperti perseteruannya dengan mantan Bupati Kolaka Buhari Matta pada tahun 2011.<sup>71</sup> Selain Buhari Matta, Nur Alam juga mendapatkan saingan dari etnis Tolaki lainnya, yaitu Imran (Bupati Konawe Selatan periode 2005-2015) dan Lukman Abunawas (Bupati Konawe 2003-2013). Namun demikian, pengaruh Imran meredup setelah ia tidak terpilih kembali menjadi ketua DPD Demokrat Sulawesi Tenggara, sedangkan Lukman Abu Nawas meredup seiring dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Bupati Konawe 2013. Politisi asal kepulauan juga menjadi saingan kuat Nur Alam di Sulawesi Tenggara, seperti Ridwan BAE (Mantan Bupati Muna/Ketua DPD Golkar Sultra) dan Amirul Tamin (mantan Walikota Bau-Bau/politisi PPP).<sup>72</sup> Namun pada akhirnya, Ridwan maupun Amirul harus mengakui ketangguhan Nur Alam setelah kalah dalam pertarungan pemilihan Gubernur Sultra 2013. Keberhasilan Nur Alam memenangkan Pemilu 2013, tidak terlepas dari kemampuannya merangkul lawan politiknya seperti Imran, Lukman Abu Nawas dan Laode Ida, politisi yang sebelumnya kerap berbeda pandangan dengannya.

Setelah berhasil menaklukkan lawan-lawan politiknya, Nur Alam memperkuat kekuasaannya melalui kerja sama dengan sebagian saingan politik sebelumnya, seperti menunjuk Lukman Abunawas<sup>73</sup> sebagai Sekdaprov. Nur Alam juga merangkul elit berpengaruh di jajaran elit politik dan birokrasi, seperti dukungan terhadap Kerry Saiful Kongoosa<sup>74</sup> dalam Pemilu Konawe,

dukungan terhadap dr. L.M. Baharuddin<sup>75</sup> di Muna. Promosi dan pengangkatan Pj Bupati dari kalangan elit birokrasi seperti: Tony Herbiansyah<sup>76</sup> sebagai Pj. Bupati Kolaka Timur, Nur Sinapoy<sup>77</sup> sebagai Pj. Bupati Konawe Kepulauan, Irawan Laliasa<sup>78</sup> sebagai Plt. Bupati Konawe Selatan, Zayat Qaimuddin<sup>79</sup> sebagai Plt. Bupati Muna. Para pejabat yang dirangkul oleh Nur Alam merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh secara politik di Sulawesi Tenggara. Akomodasi politik ini menjadikan para elit merasa nyaman dan memilih bekerja sama dengan Nur Alam.

Nur Alam juga sangat populer dikalangan elit tradisional setelah ia dinobatkan sebagai Mokole Konawe (Raja Konawe) oleh Lembaga Adat Tolaki.<sup>80</sup> Selain merangkul para elit, Nur Alam juga menyiapkan keluarganya sebagai calon penerusnya di politik lokal Sultra. Nur Alam mendukung kakaknya Asnawi Syukur sebagai salah satu Calon Bupati Konawe Selatan yang diusung oleh PAN. Nur Alam juga tampak mulai mempersiapkan istrinya sebagai penggantinya pasca Tina Nur Alam

---

Kongoosa. Kerry merupakan adik Bachrun Kongoosa, politisi Golkar dan mantan Ketua DPRD Kota Kendari. Dalam diri Kerry mengalir darah Golkar yang kental, namun hal ini tidak serta merta sejalan dengan pilihan politiknya. Kerry memilih berseberangan dengan kakaknya sebagai politisi Golkar, ia memilih menjadi politisi PAN dan terpilih menjadi Bupati Konawe Periode 2013-2018. Kongoosa dianggap sebagai keluarga besar dan disegani di kalangan etnis Tolaki.

<sup>75</sup> dr. Baharuddin adalah mantan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, anak Raja Muna terakhir, ipar dari Ridwan Bae (Anggota DPR RI, mantan Bupati Muna/Ketua DPD Golkar Sultra).

<sup>76</sup> Tony Herbiansyah adalah anak mantan Bupati Kendari Andrey Jufri (Ketua DPW PAN pertama Sultra), sepupu Tina Nur Alam. Tony juga pernah menjadi Wakil Bupati Konawe saat Lukman Abunawas menjadi Bupati. Tommy juga pernah mencalonkan diri menjadi Bupati Konawe meskipun gagal.

<sup>77</sup> Nur Sinapoy adalah birokrat di Pemprov Sultra. Dikalangan masyarakat Tolaki, marga Sinapoy termasuk dalam keluarga pejabat.

<sup>78</sup> Irawan Laliasa adalah seorang Birokrat yang pernah bertarung dalam pemilihan kepala daerah Konawe Selatan.

<sup>79</sup> Zayat Kaiumuddin berlatar belakang Birokrat. Ia juga merupakan anak mantan Gubernur Sultra Laode Kaimuddin.

<sup>80</sup> Sinar Harapan.com, "Nur Alam Dinobatkan jadi "Apuno Mokoleno Tolaki"", 18 Mei 2015. <http://www.sinarharapan.co/news/read/140422028/Nur-Alam-Dinobatkan-jadi-Apuno-Mokoleno-Tolaki->, diakses pada tanggal 18 November 2015.

---

<sup>71</sup> Yamin Indas, "Gubernur Nur Alam Memilih Dia", 12 September 2011. <https://yaminindas.wordpress.com/2011/09/12/gubernur-nur-alam-memilih-diam/>, diakses pada tanggal 18 April 2015.

<sup>72</sup> Yusran Taridala, "Enam Jawara Politik di Sultra", 29 Juni 2011. <https://yusrantaridala2010.wordpress.com/2010/06/29/enam-jawara-politik-di-sultra/>, diakses pada tanggal 18 April 2015.

<sup>73</sup> Lukman Abunawas adalah mantan Bupati Konawe (dulu Kendari) dua periode, mantan Ketua DPD II Golkar Konawe. Ia anak mantan Bupati Kendari tahun 1970-an. Lukman Abunawas bersaudara dengan Mansur Masie Abunawas (mantan Walikota Kendari). Pengalaman jabatan dan sejarah yang dicapai oleh keluarga Abunawas, menjadikannya/diklaim sebagai marga besar di Kendari yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh etnis Tolaki.

<sup>74</sup> Kerry Saiful Kongoosa adalah anak Bupati Pertama Kendari,

terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili PAN, setelah berhasil mengalahkan Laode Ida pada Pemilu 2014 lalu. Saat ini, Tina Nur Alam mulai mempersiapkan diri menggantikan suaminya sebagai Gubernur Sultra.

## Penutup

Di era desentralisasi, Nur Alam muncul sebagai seorang bos lokal di Sulawesi Tenggara. Bos lokal muncul di Sulawesi Tenggara sama dengan berkembangnya “bos lokal” di Indonesia pada umumnya yaitu muncul pasca Orde Baru berakhir. Hal tersebut mengkonfirmasi pendapat John Sidel yaitu “bos lokal” dihambat kemunculannya di Indonesia selama Orde Baru dan dihambat juga ketika sistem pemilihan tidak langsung. Bos lokal di Sulawesi Tenggara muncul setelah membangun fondasi kekuatan lokalnya sejak zaman Orde Baru dengan memperkuat basis ekonomi dan di era reformasi terpilih menjadi ketua Partai Politik, anggota DPRD dan Gubernur.

Bos lokal di Sulawesi Tenggara melakukan akumulasi kekayaan dengan mengerjakan proyek-proyek negara. Hal tersebut mengkonfirmasi pendapat John Sidel yang melihat bahwa para bos lokal memperoleh kekuasaan dan kekayaan bukanlah dari kepemilikan tanah pribadi tetapi dari sumber-sumber negara dan perdagangan. Bos lokal di Sulawesi Tenggara melakukan kontrol terhadap pejabat publik, yaitu dengan menempatkan pejabat Bupati dari orang-orang kepercayaannya, menitipkan orang-orangnya sebagai penyelenggara Pemilu. Hal tersebut mengkonfirmasi pendapat John Sidel, dimana para bos lokal melakukan kontrol terhadap pejabat terpilih untuk mendapatkan akses dan monopoli atas pengaturan sumber dan hak-hak istimewa negara.

Bos lokal di Sulawesi Tenggara berhasil menjadi Gubernur melalui dukungan kelompok sesama etnis (Pemilukada 2008), pertukaran suara dengan kebijakan pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan pedesaan, pembangunan sarana transportasi dan infrastruktur fisik lainnya (Pemilukada 2013). Hal tersebut mengkonfirmasi teori John Sidel, “bos lokal” memobilisasi masyarakat dengan mengeksploitasi politik etnis, melakukan pertukaran (transaksional) suara

pemilih dengan bantuan ekonomi, bibit, irigasi, pelunasan hutang dan alat tukar lainnya.

Keberadaan bos lokal di Sulawesi Tenggara mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal tersebut mengkonfirmasi teori John Sidel yaitu bahwa keberadaan “bos lokal” yang sering diremehkan sebagai musuh pembangunan, namun pada kenyataannya lebih tampak sebagai agen terdepan perkembangan kapitalis. Bos lokal di Sulawesi Tenggara menggunakan intimidasi kekerasan (premanisme dan kriminalisasi) dan kerja sama dalam memperoleh dukungan politik. Hal ini sejalan dengan pendapat John Sidel, bahwa “*bossisme* lokal” di Indonesia dibangun melalui persaingan dan kerja sama dengan elit politik, birokrat dan penegak hukum untuk mendapatkan dan melanggengkan kekuasaan.

Bos lokal di Sulawesi Tenggara mempunyai kekuasaan monopolistis dengan menempatkan orang-orangnya dan keluarganya sebagai penerus kekuasaannya. Hal ini sejalan dengan pendapat John Sidel bahwa para “bos lokal” mewariskan daerah kekuasaannya kepada generasi penerus dengan model dinasti. Bos lokal yang muncul di Sulawesi Tenggara atas keberhasilannya mengalahkan dan kerja sama dengan rival “bos lokal” yang lain. Hal tersebut sejalan dengan pendapat John Sidel dan Takeshi Kawanaka bahwa kekuasaan “bos lokal” selalu dibangun dari dinamika kompetisi dan kompromi diantara “bos-bos lokal” lainnya beserta keluarga politik dan mesin politik mereka. Namun demikian, bos lokal yang muncul di Sultra tidak berpindah afiliasi partai yaitu hanya menguasai PAN. Hal tersebut membantah teori John Sidel.

Nur Alam sebagai bos lokal menjadi patron tertinggi bagi orang Tolaki, dimana kliennya adalah masyarakat sesama etnis Tolaki. Setelah menjadi gubernur, Nur Alam dipandang sebagai patron tertinggi masyarakat Sulawesi Tenggara. Sebagai patron orang Tolaki dan patron masyarakat Sultra, Nur Alam dipandang bisa mendatangkan kesejahteraan dan mengatur rekrutmen pejabat publik yang bisa menguntungkan kelompoknya (klien). Dengan demikian, relasi patronase di Sulawesi Tenggara tidak hanya tumbuh dan berkembang karena perubahan struktur pemerintahan dan

ketimpangan ekonomi masyarakat, namun ditopang pula oleh ikatan primordialisme yang kuat. Hal ini menolak tesis Sidel bahwa bos lokal muncul akibat kegagalan kekerabatan masyarakat. Bos lokal Sultra berkembang di lingkungan yang masih kuat ikatan kekerabatannya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Mulyo, Sumedy Andono et.al. 2009. *Data dan Informasi Dalam Rangka Penyusunan Rancangan RPJMN 2010-2014 Berdimensi Ruang dan Wilayah Sulawesi*. Jakarta: Bappenas.
- Nordholt, Henk Schulte, Gerry Van Klinken dan Ireen Karang-Hogeenboom. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: YOI.
- Robison, Richard. 2012. *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Komunitas Bambu: Jakarta.
- Sidel, John T. 1999. *Capital, Coercion and Crime : Bossism in the Philippines*. Stanford : Stanford University Press.
- Sidel, John T. 2005. "Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia, Menuju Kerangka Analisis Baru Tentang "Orang Kuat Lokal", dalam *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2010. *Mencari Indonesia 2: Batas-Batas Rekeyasa Sosial*. Jakarta: LIPI Press.
- , 2006. *Desentralisasi dan Good Governance di Sulawesi Tenggara: Peran Akademisi dan Intelektual dalam Proses Pemekaran Wilayah*. LIPI: Jakarta.
- Warsilah, Henny. 2006. *Perjalanan Demokrasi Provinsi Sulawesi Tenggara vs Premanisme Ala Orde Baru*. Jakarta: LIPI.

### Jurnal

- Agustino, Leo dan Mohammad Agus Yusoff. 2010. "Pilkada Dan Pemekaran Daerah Dalam Demokrasi Lokal Di Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits". *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies* Vol. 37.
- Agustino, Leo dan Mohammad Agus Yusoff. 2010. "Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik". *Jurnal Ilmu Politik*. Edisi 21.

- Aspinal, Edward. "When Brokers Betray: Clientalism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia". *Critical Asian Studies* 46, 2014.
- Buehler, Michael dan Paige Tan. 2007. "Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics : A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province". *Indonesia*. No. 84.
- Irawati, Ira. dkk. 2008. "Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam, Serta Variabel Sumber Daya Manusia Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara". *Jurnal Teknik Industri*. Undip: Semarang.
- Supriatma, Antonius Made Tony. 2009. "Menguatnya Kartel Politik Para Bos". *Jurnal Prisma*. Vol. 28. No. 2. Oktober.
- Vel, Jacqueline. 2005. "Pilkada in East Sumba : An Old Rivalry in A New Democratic Setting". *Indonesia*. No. 80.

### Laporan dan Makalah

- Adriadi, Reko. 2013. *Pemekaran Daerah Dan "Bossisme Lokal": Studi Kasus Praktek Kekuasaan Bupati Murman Effendi Dalam Perkembangan Kabupaten Seluma Periode 2005-2011*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- BAPPEDA Sultra. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014*.
- Choi, Nankyung. 2007. "Indonesia's Direct Local Elections : Background and Institutional Framework". *Rajaratnam School of International Studies Singapore Working Paper*.
- Eko, Sutoro. *Benih Perubahan Di Atas Fondasi Politik Yang Rapuh (Studi Tentang Politik Anggaran Daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara)*. IRE: Yogyakarta. IRE'S Insight Working Paper/ Eko/1/February/ 2008.
- Hutabarat, Melvin P. "Fenomena "Orang Kuat" Di Indonesia Era Desentralisasi Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi", Tesis: Universitas Indonesia, 2012.
- Jabar, Aryuni Salpiana. 2009. *Perilaku Politik Etnis Tolaki Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2007 (Kasus: Kubu Nusa Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2007)*. Tesis. Bogor: IPB.
- Laode, M.D. 2011. *Etnis Cina Indonesia dalam Politik di Era Reformasi: Studi Kasus Keterlibatan Kelompok Etnis Cina Indonesia Dalam Politik*

- di Kota Pontianak dan Kota Singkawang Kalimantan Barat 1998-2008. Disertasi. Jakarta: UI.
- Romli, Lili. 2007. *Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten (2001-2006)*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Said D. 1997. *Pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara 1950-1978: Studi Konflik dan Integrasi*. Tesis. Program Studi Ilmu Sejarah Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta: UI.
- Suaib, Eka. 2005. *Etnisitas Kebijakan Publik (Studi Pemanfaatan Etnis Dalam Arena Politik Lokal di Kota Kendari)*. Disertasi: Universitas Airlangga.
- Suaib, Eka. 2015. *Institusionalisasi Partai Politik (Studi Kasus Hegemoni PAN Di Sulawesi Tenggara)*. Makalah Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak di Universitas Hasanuddin.
- Zuada, La Husen. 2013. *Desentralisasi dan Gerakan Sosial: Studi Polarisasi Gerakan Advokasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kendari Tahun 2008*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- The World Bank, Pemda Sultra, Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo (LEMLIT UNHALU), CIDA dan AusAID. 2011. *Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo*. Jakarta: The World Bank.
- Zuada, La Husen. 2015. *Menciptakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Berintegritas, Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Substansial*. Makalah: disampaikan dalam Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Hotel Clarion Kendari. Sabtu 12 Agustus.
- Wawancara dengan G, salah satu jurnalis yang bernaung di AJI, pukul 09.00 WITA tanggal 20 Oktober 2015.
- Wawancara dengan D, aktivis perempuan Sultra, pukul 10.47 WITA tanggal 19 November 2015.
- Wawancara dengan Y, Mantan penyelenggara Pemilu Sultra, Pukul 13.19 WITA tanggal 17 November 2015.
- Wawancara dengan G, Akademisi UHO, Pukul 12.30 WITA tanggal 20 November 2015.
- Surat Kabar dan Website**
- Majalah TEMPO, Edisi 8-14 September 2014.
- Antara Sulsel. "FTRW Tolak Sultra Jadi Kawasan Pertambangan Nasional". 25 Januari 2011. <http://www.antarasulsel.com/berita/24029/>
- ftw-tolak-sultra-jadi-kawasan-pertambangan-nasional.
- ANTARA SULTRA.com. "FMSB Minta Hentikan Proyek Jembatan 'Bahteramas'". 10 Desember 2011. <http://antarasultra.com/print/262827/fmsb-minta-hentikan-proyek-jembatan-bahteramas>.
- Asman Sahaludin. "341 IUP Pertambangan di Sulawesi Tenggara; Rahmat atau Petaka". 4 Agustus 2012. [http://www.kompasiana.com/asman\\_sahaluddin/341-iup-pertambangan-di-sulawesi-tenggara-rahmat-atau-petaka\\_5512ddca33311dd67ba7df3](http://www.kompasiana.com/asman_sahaluddin/341-iup-pertambangan-di-sulawesi-tenggara-rahmat-atau-petaka_5512ddca33311dd67ba7df3).
- Berita Lingkungan. "Mahasiswa Kendari Tolak Kawasan Ekonomi Khusus". 24 Maret 2011. <http://www.beritalingkungan.com/2011/03/mahasiswa-kendari-tolak-kawasan-ekonomi.html>.
- Butonsultra.com. "Profil H. Nur Alam SE M.Si Gubernur Ke 9 Sultra 2008-2018". 2013. <http://infoduniaraya.blogspot.co.id/2014/08/profil-h-nur-alam-se-msi-gubernur-ke-9.html>.
- CENDANA NEWS. "Kota Lama Kendari, Warisan yang Terampas Ambisi Pembangunan Jembatan". 11 Februari 2015. <http://www.cendananeews.com/2015/02/kota-lama-kendari-warisan-yang-terampas.html>.
- Detiknews. "Ini Kekayaan Gubernur Sulawesi Tenggara yang Disebut Berekening Gendut". 17 Desember 2014. <http://news.detik.com/berita/2780376/ini-kekayaan-gubernur-sulawesi-tenggara-yang-disebut-berekening-gendut>.
- Gatranews. "Spartan: Tangkap Ribuan Preman Pembubar Aksi Demo" 20 Februrari 2014. <http://www.gatra.com/nusantara-1/sulawesi-1/47573-spartan-tangkap-ribuan-preman-pembubar-aksi-demo.html>.
- JPPN.com. "Pemprov Sultra Diminta Jujur soal KEK Pertambangan". 26 Januari 2011. <http://www.jpnn.com/read/2011/01/26/82898/Pemprov-Sultra-Diminta-Jujur-soal-KEK-Pertambangan->
- JPPN.com. "KEK di Sultra Direspon Positif". 24 Januari 2011. <http://www.jpnn.com/read/2011/01/24/82703/KEK-di-Sultra-Direspon-Positif>.
- JPPN.com. "La Ode Ngaku Dilarang Komentari Rekening Gendut Nur Alam". 27 Desember 2014. <http://www.jpnn.com/read/2014/12/27/277913/La-Ode-Ngaku-Dilarang-Komentari-Rekening-Gendut-Nur-Alam>.
- Kompas. Com. "Sebut Anggota Panwaslu "Gigolo" di Facebook, Wanita Ini Ditangkap". 22

- Oktober 2014. <http://regional.kompas.com/read/2014/10/22/22360761/Sebut.Anggota.Panwaslu.Gigolo.di.Facebook.Wanita.Ini.Ditangkap>.
- Nur Iman Subono. "Raja Lokal, Bos Lokal dan Chao Pho". 1 Desember 2006. <http://demosindonesia.org/2006/12/raja-lokal-bos-lokal-dan-chao-pho/>.
- Pemuda Bergerak. "Penyerangan Aktivistis Mahasiswa bentuk kepanikan Gubernur Sultra". 21 Desember 2013. <https://pemudabergerak.wordpress.com/2013/12/21/penyerangan-aktivis-mahasiswa-bentuk-kepanikan-gubernur-sultra/>.
- Sinar Harapan.com. "Nur Alam Dinobatkan jadi "Apuno Mokoleno Tolaki"". 22 April 2014. <http://www.sinarharapan.co/news/read/140422028/Nur-Alam-Dinobatkan-jadi-Apuno-Mokoleno-Tolaki->.
- Serru.com. "Tersandung Skandal Seks, Gubernur Sultra Didesak Bertanggung Jawab". 7 oktober 2013. <http://utama.seruu.com/read/2013/10/07/186164/tersandung-skandal-seks-gubernur-sultra-didesak-bertanggung-jawab>.
- Syarlin Syamsudin. "Nur Alam Selayang Pandang". 23 September 2012. <http://brigadenuralam.blogspot.co.id/>.
- Tempo.com. "Kasus Rekening Gendut, Nur Alam Tunjuk Para Bupati". 24 Desember 2014. <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/24/063630803/kasus-rekening-gendut-nur-alam-tunjuk-para-bupati>.
- Yamin Indas. "Selamat Berulang Tahun Gubernur Nur Alam". 8 Juli 2015. <http://yaminindas.com/?p=1272>.
- Yamin Indas. "Memacu Diri Hingga Mencapai Puncak". 27 Juni 2013. <http://yaminindas.com/?p=520>.
- Yamin Indas. "Gubernur Nur Alam Memilih Dia". 12 September 2011. <https://yaminindas.wordpress.com/2011/09/12/gubernur-nur-alam-memilih-dia/>.
- Yusran Taridala. "Enam Jawara Politik di Sultra". 29 Juni 2011. <https://yusrantaridala2010.wordpress.com/2010/06/29/enam-jawara-politik-di-sultra/>.